

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023**



**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024**

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan media pertanggung jawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018- 2023, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sidenreng Raappang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pangkajene Sidenreng, 14 Maret 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LatarBelakang	1
1.2. Gambaran Umum Kabupaten.....	2
1.3. PertumbuhanEkonomi.....	9
1.4. Kondisi Pemerintahan	10
1.5. Jumlah Aparatur Sipil Negara	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Tahun 2019–2023.....	16
2.1.1. Visi	16
2.1.2. Misi.....	17
2.1.3. Tujuan dan Sasaran.....	18
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	21
2.3. Perjanjian Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023.....	24
3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023.....	27
3.3. Realisasi Anggaran.....	82
3.4. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Tahun 2023	86
BAB IV PENUTUP.....	93

LAMPIRAN :

1. Pernyataan Telah Direviu Oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Rencana Kinerja Tahunan 2024 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
5. SOP Penyusunan LKjIP Kabupaten Sidenreng Rappang
6. Penghargaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LatarBelakang	1
1.2. Gambaran Umum Kabupaten.....	2
1.3. PertumbuhanEkonomi.....	9
1.4. Kondisi Pemerintahan	10
1.5. Jumlah Aparatur Sipil Negara	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Tahun 2019–2023.....	16
2.1.1. Visi	16
2.1.2. Misi.....	17
2.1.3. Tujuan dan Sasaran.....	18
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	21
2.3. Perjanjian Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023.....	24
3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023.....	27
3.3. Realisasi Anggaran.....	82
3.4. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Tahun 2023	86
BAB IV PENUTUP.....	93

LAMPIRAN :

1. Pernyataan Telah Direviu Oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Rencana Kinerja Tahunan 2024 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
5. SOP Penyusunan LKjIP Kabupaten Sidenreng Rappang
6. Penghargaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

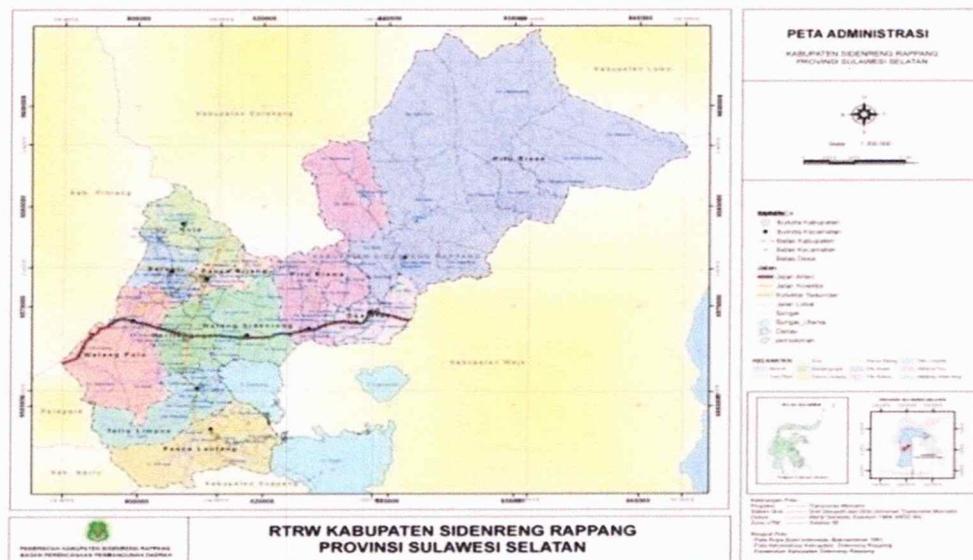
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten / kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

1.2 GAMBARAN UMUM

1.2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Sidenreng Rappang secara geografis terletak di antara $3^{\circ}43' - 4^{\circ}09'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 41' - 120^{\circ} 10'$ Bujur Timur kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Secara umum kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh daerah yang datar, kondisi lain adalah daerah perbukitan dan yang lebih kecil adalah daerah pegunungan. Letak Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan :



Gambar1.1Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

- Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Barat : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang

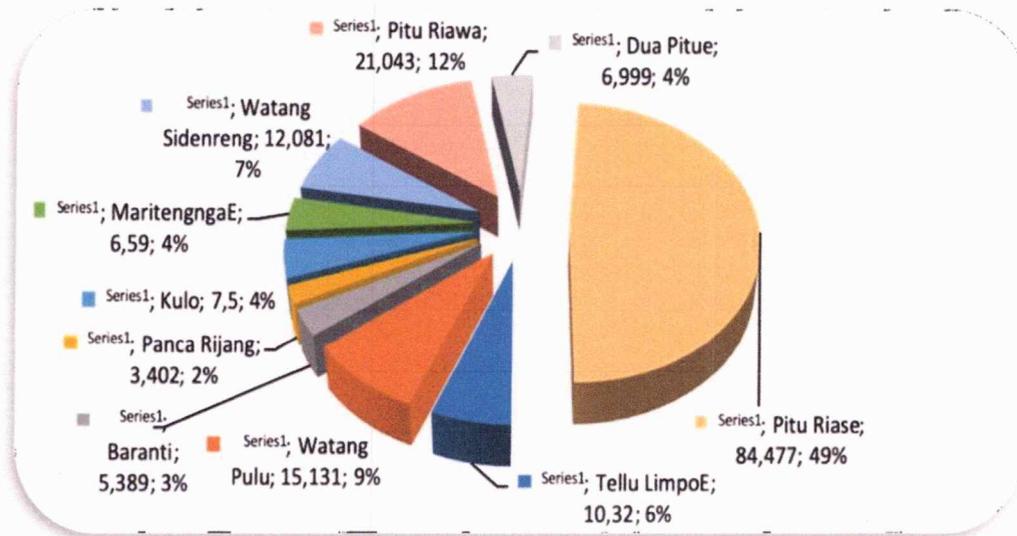
Wilayah Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 1.883,25KM2 terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut
Kecamatan (Ha) dan Jumlah Desa/Kelurahan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan	
			Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	15.393	3	7
2	Tellu LimpoE	10.320	6	3
3	Watang Pulu	15.131	5	5
4	Baranti	5.389	5	4
5	Panca Rijang	3.402	4	4
6	Kulo	7.500	-	6
7	MaritengngaE	6.590	7	5
8	Watang Sidenreng	12.081	3	5
9	Pitu Riawa	21.043	2	10
10	Dua Pitue	6.999	2	8
11	Pitu Riase	84.477	1	11
Jumlah		188.325	38	68

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang;

Berdasarkan informasi pada Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa dari 11 kecamatan, terlihat bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Pitu Riase dengan luas 84.477 Ha, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Maritengngae dengan luas 6.590 Ha, secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini :



1.2.2. Kondisi Topografi

Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari kondisi kelerengannya dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu :

- Lereng 0-2% meliputi 42,80% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 80.611 Ha, kelerengannya ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 0–2% paling luas adalah Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 % dari luas areal yang berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang seluas 3.402 Ha (4,22%) luas areal yang berlereng 0–2 %.

Lereng 2-15 % meliputi 4,6% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 8.790 Ha, kelerengannya ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengannya ini baik dimanfaatkan untuk tanaman pertanian dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah sawah, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 2–15% paling luas adalah Pitu Riase seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha atau 26,23%, Panca Lautang seluas 1.389 Ha (15,80), Pitu Riawa seluas 923 Ha (10,55%) dan Tellu LimpoE seluas 715 Ha atau 8,13%. Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua pituE tidak terdapat jenis kelerengannya ini. Lereng 15-40 % meliputi 16,68% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 31,414 Ha, kelerengannya ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengannya ini masih cukup baik dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan

- perkebunan dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan dan persawahan, Kecamatan yang mempunyai lereng 15-40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang seluas 3.573 Ha atau 11,37%, Pitu Riase seluas 3.456 Ha (11%), Tellu LimpoE mempunyai luas dengan kelerengan 15-40% 2.244 Ha (7,14%) dan Kecamatan Wattang Pulu seluas 1.658 Ha (5,28%). Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua PituE tidak terdapat jenis kelerengan ini.
- Lereng di atas 40 % meliputi 34,31% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 64.614 Ha. Daerah ini merupakan daerah yang harus dihutankan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) kecamatan. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis), kecamatan yang mempunyai lereng diatas 40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas 7.592 Ha (11,75%), Tellu LimpoE mempunyai luas 2.524 Ha (3,91 %), Panca Lautang seluas 2.138 Ha atau 3,31%, dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.549 Ha (2,04%).

Kondisi topografi untuk wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi dengan daratan tertinggi adalah Kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1000 M diatas permukaan laut (dpl), dan dataran terendah adalah Kecamatan MaritengngaE, Panca Rijang, Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0-25M dpl.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, kemudian berbukit dan terakhir adalah Rawa Danau. Khusus Kecamatan Baranti, MaritengngaE dan Dua PituE kondisi topografi 100% tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca Lautang, Tellu LimpoE, Watang Pulu dan Pitu Riase didominasi keadaan tanah bergunung. Kondisi Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 22***Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018***

No	Kecamatan	Keadaan Tanah (%)				
		Datar	Berbukit	Bergunung	Rawa / Danau	Total
1	Panca Lautang	15	25	57	3	100
2	Tellu LimpoE	15	35	49	1	100
3	Watang Pulu	25	5	70	-	100
4	Baranti	100	-	-	-	100
5	Panca Rijang	97	3	-	-	100
6	Kulo	90	5	5	-	100
7	MaritengngaE	100	-	-	-	100
8	Watang Sidenreng	85	15	-	-	100
9	Pitu Riawa	60	10	30	-	100
10	Dua Pitue	100	-	-	-	100

Sumber: BPS Kabupaten SidenrengRappang; 2018

1.2.2. Kondisi Pengguna Lahan

Sumber daya lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terlihat dari kondisi tutupan lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah, klimatologi wilayah, dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan lahan yang terbentuk hingga saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas Sawah, Pemukiman, Kebun Campur, Ladang, Kolam/Tambak/Rawa, Danau/Sungai, Perkebunan Rakyat, Hutan, Lapangan Olahraga, Semak/Belukar.

Penggunaan lahan didominasi oleh Kawasan Hutan dengan luas 82.669,05Ha atau mencapai 43,89% dari total luas wilayah Kabupaten sebesar 188.325 Ha, dan Persawahan dengan luas 38.98 9,58 Ha atau sebesar 20,70% dari luas kabupaten. Khusus untuk kawasan permukiman dengan luas 5.989,95(3,18%) dengan luas permukiman yang paling besar berada di Kecamatan MaritengngaE dengan luas 1.154,57 Ha dan yang paling kecil Kecamatan Baranti dengan luas 282,58 Ha. Secara lengkap struktur penggunaan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	PERUNTUKAN KAWASAN BUDIDAYA	LUAS LAHAN (Ha)
1	Sawah	38.989,58
2	Permukiman	5.989,95
3	Kebun Campur	22.403,32
4	Ladang/Tegalan	2.487,02
5	Kolam/Tambak/Rawa	265,10
6	Danau/Sungai	5.867,86
7	Perkebunan Rakyat	9.323,65
8	Hutan	82.669,05
9	Lapangan Olahraga	5,83
10	Semak/Belukar	20.323,64
	Total	188.325,00

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang

1.2.4 Aspek Demografi

Jumlah penduduk merupakan salah satu potensi oleh suatu daerah dalam menyediakan tenaga kerja dengan kriteria keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses pembangunan. Potensi demografi ini harus dapat diimbangi dengan kualitas kehidupan yang baik agar jumlah penduduk yang besar tersebut tidak menjadi beban tetapi membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi disuatu daerah termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.4**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017**

NO	KECAMATAN	TAHUN									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Panca Lautang	16,948	17,071	17,241	17,339	17,442	18,113	17,277	17,242	17,203	17,151
2	Tellu Limpoe	21,356	21,511	22,728	22,871	23,089	23,415	23,456	23,582	23,700	23,812
3	Watang Pulu	25,772	25,959	30,128	30,582	30,947	31,590	33,420	34,235	35,061	35,904
4	Baranti	26,378	26,569	28,068	28,369	28,522	28,997	29,476	29,763	30,045	30,313
5	Panca Rijang	25,077	25,258	27,086	27,332	27,613	28,195	28,173	28,383	28,584	28,779
6	Kulo	10,583	10,660	11,345	11,462	11,586	11,831	11,917	12,031	12,147	12,256
7	Maritenggae	40,473	40,767	46,139	46,643	47,203	48,197	48,955	49,563	50,172	50,767
8	Watang Sidenreng	15,616	15,729	17,051	17,203	17,395	17,762	17,605	17,703	17,805	17,893
9	Pitu Riawa	24,038	24,212	24,980	25,213	25,473	26,210	25,831	25,984	26,132	26,269
10	Dua Pitue	26,151	26,340	27,272	27,549	27,865	28,252	28,513	28,775	29,040	29,300
11	Pitu Riase	18,274	18,407	19,873	20,089	20,316	20,745	21,987	22,526	23,096	23,681
Jumlah		250,666	252,483	271,911	274,652	277,451	283,307	286,610	289,787	292,985	296,125

1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam proses pembangunan ekonomi, perubahan struktur ekonomi merupakan hal yang penting. Kontribusi masing-masing sektor pembentuk PDRB mungkin saja akan bervariasi dari waktu ke waktu. Untuk melaksanakan pembangunan dengan sumber daya yang terbatas sebagai konsekuensinya harus difokuskan kepada pembangunan sektor-sektor yang memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap sektor-sektor lainnya atau perekonomian secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat pergerakan perekonomian daerah. Oleh karena itu, indikator pertumbuhan ekonomi selalu menjadi acuan awal dalam memetakan kebijakan-kebijakan strategis terkait peningkatan kualitas perekonomian daerah, tak terkecuali Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jika melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki pertumbuhan ekonomi pada kategori rendah dengan capaian 7,11 persen dengan peringkat ke-16 dalam lingkup provinsi. Angka ini berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai 7,23 persen pada tahun 2017 ini. Sebaiknya, potensi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat meningkatkan posisi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, permasalahan perekonomian harus diupayakan untuk melihat sektor-sektor strategis dan potensial untuk mendorong roda perekonomian daerah. Pada negara berkembang, kontribusi sektor industri harus memegang peranan yang penting, karena sektor industri sampai saat ini mampu memberikan dampak pengganda terhadap perekonomian. Kegiatan perekonomian daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dominan pada sector pertanian. Selain aspek perekonomian yang perlu dikembangkan, pembangunan daerah perlu juga memperhatikan aspek sosial dan budaya untuk menyeimbangkan kehidupan yang berbudi dan pekerti yang luhur serta mulia.

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan dan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, berkelanjutan dan bertahap ketingkat yang lebih maju dan lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan harus dilakukan secara bertahap di segala bidang/sector maupun sub sektor secara terencana dan terprogram. Salah satu cara mencapai keberhasilan pembangunan adalah dengan adanya pembangunan ekonomi. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan

dan pemanfaatan hasil-hasil strategis terutamanya yang menyangkut komoditas pangan. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil produk pertanian ini diharapkan dapat dilakukan secara lebih terencana dengan pemanfaatan yang optimum serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Indikator pembangunan ekonomi daerah tercermin dalam perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Perkembangan PDRB tersebut akan bermanfaat dalam perencanaan pembangunan. Sektor pertanian sendiri merupakan sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan perekonomian. Perkembangan dan Pertumbuhan Atas Sektor PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019- 2023.

1.4. Kondisi Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 2. Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 3. Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

4. Dinas Sosial merupakan Tipe C Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang social;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Tipe A menyelenggarakan dan desa, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Satua Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub ketentraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu merupakan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. Dinas perdagangan dan Perindustrian merupakan Tipe B Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan persandian;
11. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup merupakan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. Dinas Pekerjaan Umum, penata Ruang dan Peerhubungan merypakan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan biddang perhubungan;
13. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum;
14. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan merypakan Tipe A yang Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan bidang ketahanan pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Tipe B yang menyelenggarakan

16. urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;

e. Badan Daerah, terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengolah Keuangan Daerah merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan Daerah;
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Tipe A;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

f. Kecamatan, terdiri dari:

1. Kecamatan Panca Lautang merupakan Kecamatan Tipe A;
2. Kecamatan Tellu Limpoe merupakan Kecamatan Tipe A;
3. Kecamatan Watang Pulu merupakan Kecamatan Tipe A;
4. Kecamatan Baranti merupakan Kecamatan Tipe A;
5. Kecamatan Panca Rijang merupakan Kecamatan Tipe A;
6. Kecamatan Kulo merupakan Kecamatan Tipe A;
7. Kecamatan Maritengngae merupakan Kecamatan Tipe A;
8. Kecamatan Watang Sidenreng merupakan Kecamatan Tipe A;
9. Kecamatan Pitu Riawa merupakan Kecamatan Tipe A;
10. Kecamatan Dua Pitue merupakan Kecamatan Tipe A;
11. Kecamatan Pitu Riase merupakan Kecamatan Tipe A;

Tabel 1.5
Urusan Pemerintahan Berdasarkan
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
Yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal
2	Kesehatan	-
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	-
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta <i>Perlindungan Masyarakat</i>	-
6	Sosial	-
	URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)	
1	Tenaga Kerja	-
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
3	Pangan	-
4	Pertanahan	-
5	Lingkungan Hidup	-
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
9	Perhubungan	-
10	Komunikasi dan Informatika	-
11	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Koperasi dan Usaha Mikro
12	Penanaman Modal	-
13	Kepemudahaan dan Olah Raga	-
14	Statistik	-
15	Persandian	-
16	Kebudayaan	-

17	Perpustakaan	-
18	Kearsipan	-
	URUSAN PILIHAN	
1	Kelautan dan Perikanan	Perikanan
2	Pariwisata	-
3	Pertanian	-
4	Perdagangan	-
5	Kehutanan	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten
6	Energi dan Sumber Daya Meneral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten
7	Perindustrian	-
8	Transmigrasi	-

1.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara

a) Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tabel 1.6

Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	1.978	39,27%
2.	Perempuan	3.058	60,72%
	Total	5.036	100%

sumber : BKD Kab.Sidrap keadaan Desember 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa PNS didominasi oleh perempuan sebanyak 3.056 orang atau 60,72% sedangkan laki-laki sebanyak 1.918 orang atau 38,28% dari total PNS yang ada.

b) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.7
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah PNS	
		Jumlah	Persentase %
1	S.3	2	0.03%
2	S.2	563	11.18%
3	S.1	3.174	63.03%
4	D.IV	97	1.93%
5	D.III	463	9.19%
6	D.II	48	0.96%
7	D.I	10	0.19%
8	SLTA	635	12.62%
9	SLTP	35	0.70%
10	SD	9	0.17%
	Total	5.036	100%

Sumber : BKD Kab.Sidrap Keadaan Desember 2019

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Startegis Tahun 2019-2023

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional mau pun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu–isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1.1.2 Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan H. DOLLAH MANDO (Bupati) – H.MAHMUD YUSUF (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH AGRIBISNIS
YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA”**

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Sidenreng Rappang Daerah Agribisnis yang Maju”, dengan masyarakat yang Religius, Aman, Adil dan Sejahtera. Kelima pokok visi tersebut, yang menjadi fokus gerakan pembangunan dengan “Sidenreng

Rappang” yang dicita-citakan dan diharapkan kedepan, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pernyataan Visi, Pokok Visi dan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Pokok Visi
Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera	Agribisnis yang maju	Berkembangnya Sidenreng Rappang menjadi daerah yang berbasis usaha pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.
	Religius	Terwujudnya masyarakat Sidenreng Rappang menjadi insan yang bertaqwa, berperilaku taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter teguh terhadap nilai-nilai agama, bersikap toleran dan menjalin kerukunan hidup dengan pemeluk agama lain, serta kepekaan sosial yang tinggi.
	Aman	Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat Sidenreng Rappang yang tenteram dan kondusif yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.
	Adil	Terbangunnya Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa diskriminasi yang ditandai dengan adanya pemberian kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga terwujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
	Sejahtera	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang yang ditandai dengan meningkatnya IPM, pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan, serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material.

2.2 Misi

Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan.
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance.
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui penerapan desa cerdas, sehat dan mandiri.
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan 7 (tujuh) tujuan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis

Visi: Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi – 1 Memajukan dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			
		Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.	1. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, meningkatkan kualitas SDM dan pemerataan tenaga pendidik dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan

1	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang inklusif dan berdaya saing	Sasaran 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	2. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, menciptakan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas diiringi dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat.
		Sasaran 3 : Meningkatkan keberdayaan perempuan dalam pembangunan	3. Meningkatkan peran kelembagaan PUG dan forum anak, menyebarluaskan informasi kesetaraan gender dan urgensi perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan keberdayaan perempuan dalam perekonomian.
Misi – 2 Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.			
2	Tujuan 2 : Meningkatkan pendapatan masyarakat	Sasaran 4 : Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah.	4. Meningkatkan daya saing produk pertanian terpadu berbasis petik, olah, kemas dan jual disertai dengan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana pertanian
		Sasaran 5 : Menurunnya tingkat kemiskinan.	5. Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan keberdayaan penduduk miskin serta meningkatkan pendapatan kelompok penduduk terbawah dengan memperluas skema perlindungan dan bantuan sosial.
		Sasaran 6 : Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan.	
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi – 3 Mengembangkan Kerjasama Investasi Daerah dan Penyediaan Lapangan Kerja Baru			
3	Tujuan 3 : Meningkatkan Penyerapan tenaga kerja	Sasaran 7 : Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah	6. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan investasi serta daya saing pariwisata.
Misi – 4 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan.			

4	Tujuan 4 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Sasaran 8 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur daerah yang berkualitas.	7. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.
		Sasaran 9 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	8. Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana.
Misi – 5			
Mengoptimalkan Kinerja, Kualitas dan Profesionalitas Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan <i>Good Governance</i> dan <i>Electronic Government</i>			
	Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Sasaran 10 : Meningkatkan akuntabilitaskinerja pemerintah daerah.	9. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, penataan kelembagaan,serta Meningkatkan sistem Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah
		Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	10. Meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan publik serta pengembangan inovasi daerah
		Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik	11. Meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan
Misi – 6			
Mengembangkan Dan Memajukan Kawasan Pedesaan Melalui Konsep Desa Cerdas (Smart Village), Sehat Dan Mandiri.			
6	Tujuan 6 : Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa	Sasaran 13 : Terwujudnya desa maju dan mandiri.	12. Meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
Misi – 7			
Memajukan dan Menciptakan Kondisi Kehidupan Beragama Serta Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal Sebagai Basis Nilai Dalam Menciptakan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif.			

7	Tujuan 7 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Sasaran 14 : Meningkatnya kenyamanan kehidupan bermasyarakat	13. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum melalui pengawasan, pengendalian disertai dengan pendekatan sosial kemasyarakatan.
---	---	---	---

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana berikut :

Tabel 1.3
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target Kinerja Tahun ke-				Kondisi Akhir Periode RPJMD 2023
				2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,05	71,21	71,37	71,73	72,18	72,18
2	Indeks Pendidikan	Indeks	62,02	62,05	62,29	62,96	63,93	63,93
3	Indeks Kesehatan	Indeks	76,29	76,66	76,85	77,12	77,34	77,34
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	56,80	56,86	57,67	58,84	59,01	59,01
5	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	46,01	46,16	46,49	48,76	51,26	51,26
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,65	-0,59	3,38-4,51	4,39-5,86	4,51-6,01	4,51-6,01
7	Tingkat kemiskinan	%	4,79	5,05	5,01	4,11	3,17	3,17
8	Gini Ratio	Poin	0,284	0,349	0,342	0,335	0,328	0,328
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,75	5,91	5,88	5,76	5,65	5,65
10	Nilai Investasi	Rp. Triliun	3.235,98	3.449,96	3.615,32	3.780,68	3.946,04	3.946,04
11	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	%	9,21	1,67	2,00 -3,91	3,91-5,81	5,81- 7,71	5,81-7,71
12	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	66,75	67,76	71,89	74,55	77,22	77,22
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,53	65,54	66,26	66,91	67,48	67,48
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	30,02 (C)	47,12 (C)	53,08 (CC)	62,87 (B)	71,11 (BB)	71,11 (BB)
15	Nilai SAKIP	Poin	55,33 (CC)	60,03 (B)	65,19 (B)	71,46 (BB)	78,78 (BB)	78,78 (BB)
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	74,58 (C)	76,96 (B)	80,14 (B)	84,32 (B)	88,35 (A)	88,35(A)
17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,91	2,13	2,20	2,38	2,60	2,60
18	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6479	0,6583	0,7278	0,7527	0,7854	0,7854
19	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	8,823	45,59	67,47	75,00	85,29	85,29
20	Angka Kriminalitas	Kasus	474	367	355	347	339	339
21	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	73,63	59,95	73,80	74,93	76,11	76,11

3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas SDM yang Inklusif dan berdaya saing	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,18
2	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.	2 Indeks Pendidikan.	Indeks	63,93
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	3 Indeks Kesehatan.	Indeks	77,34
4	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	4 Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59,01
5	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	5 PDRB Perkapita AHB	Juta Rupiah	51,26
6	Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Perekonomian	6 Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,51-6,01
7	Menurunnya Angka Kemiskinan	7 Tingkat Kemiskinan	Persen	3,17
8	Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan	8 Gini Ratio	Point	0,328
9	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	9 Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,65
10	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Daerah	10 Nilai Investasi	Triliun Rp.	3,946,04

11	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	11	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	Persen	5,81-7,71
12	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.	12	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	77,22
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,48
14	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,11 (BB)
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	15	Nilai SAKIP	Point	78,78 (BB)
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	16	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88.32 (A)
17	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,60
18	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7854
19	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	19	Persentase Desa maju dan mandiri (IDM)	Persen	85,29
20	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20	Angka Kriminalitas	Kasus	339
21	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	21	Angka Kriminalitas Tertangani	Persen	76,11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggung jawaban publik.

3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran

strategis Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % sd. 90 %	Tinggi
3	66 % sd. 75 %	Sedang
4	51 % sd. 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Secara umum Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023.

Tabel 2.2
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
Misi I (4 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Tinggi	4	100
2	Tinggi	0	0
3	Sedang	0	0
4	Rendah	0	0
5	Sangat Rendah	0	0
	Jumlah	4	100
Misi II (4 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Tinggi	3	100
2	Tinggi	0	0
3	Sedang	0	0

4	Rendah	0	0
5	Sangat Rendah	1	31.10
	Jumlah rata-rata	4	82.8
Misi III (2 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Tinggi	1	100
2	Tinggi	1	80
3	Sedang	0	0
4	Rendah	0	0
5	Sangat Rendah	0	0
	Jumlah rata-rata	2	90
Misi IV (3 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Tinggi	3	100
2	Tinggi	0	0
3	Sedang	0	0
4	Rendah	0	0
5	Sangat Rendah	0	0
	Jumlah rata-rata	3	100
Misi V (4 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Tinggi	2	95
2	Tinggi	2	95
3	Sedang	0	0
4	Rendah	0	0
5	Sangat Rendah	0	0
	Jumlah rata-rata	4	95
Misi VI (2 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Tinggi	2	100
2	Tinggi	0	0
3	Sedang	0	0
4	Rendah	0	0
5	Sangat Rendah	0	0
	Jumlah	2	100
Misi VII (1 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Tinggi	2	100
2	Tinggi	0	0
3	Sedang	0	0
4	Rendah	0	0
5	Sangat Rendah	0	0

	Jumlah rata-rata	2	100
--	------------------	---	-----

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 21 (empat belas) Sasaran Strategis dan 21 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 16 indikator sasaran atau 100% bermakna Sangat Tinggi, 3 indikator sasaran atau 95% bermakna Tinggi, dan 1 indikator sasaran atau 51% bermakna Sangat Rendah. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 82%, dan dikriteria Tinggi. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 96.18 dengan makna Sangat Tinggi, dibandingkan pada tahun 2023 bermakna Sangat Tinggi, mengalami penurunan sebesar 14% dibandingkan capaian kinerja tahun lalu.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas SDM yang Inklusif dan berdaya saing	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,18	72.71	100,73
2	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.	2 Indeks Pendidikan.	Indeks	63,93	63.50	99,33
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	3 Indeks Kesehatan.	Indeks	77,34	78,06	100,93
4	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	4 Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59,01	56,71	96,38
5	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	5 PDRB Perkapita AHB	Juta Rupiah	51,26	55,51	100,29
6	Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Perekonomian	6 Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,51-6,01	3,28	62,36
7	Menurunnya Angka Kemiskinan	7 Tingkat Kemiskinan	Persen	3,17	5,14	37,85
8	Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan	8 Gini Ratio	Point	0,328	0,345	94,82
9	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	9 Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,65	3,29	141,77
10	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Daerah	10 Nilai Investasi	Triliun Rp.	3,946,04	4,18032	105,94

11	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	11	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	Persen	5,81-7,71	1,077	15,93
12	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.	12	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	77,22	75.23	97,42
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,48	65.79	97,50
14	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,11 (BB)	48.74	63,21
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	15	Nilai SAKIP	Point	78,78 (BB)	64.25	81,56
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	16	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88.32 (A)	77.41	87,62
17	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,60	2,87	110,38
18	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7854	0,7974	101,53
19	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	19	Persentase Desa maju dan mandiri	Persen	85,29	91.18	106,90
20	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20	Angka Kriminalitas	Kasus	339	730	15,34
21	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	21	Angka Kriminalitas Tertangani	Persen	76,11	87.40	114,83

Pengukuran capaian Indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dana nalisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Inklusif dan Berdaya Saing

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 2.4
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 1

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,18	72,71	100.73 %

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran 1 yaitu meningkatkan kualitas SDM yang Inklusif dan Berdaya Saing menunjukkan realisasi capaian indeks Pembangunan Manusia 72,71 dari target 72,18 dan rata-rata capaian kinerja yaitu sebesar 100,73% atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.5
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 1

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,21	72,06	72,71	100	100	100.73

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 1 Meningkatkan kualitas SDM yang Inklusif dan berdaya saing telah mencapai target. Capaian Indikator pada sasaran ini dari beberapa tahun yang lalu mengalami sedikit peningkatan menjadi 100,73%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.6

Perbandingan Target Realisasi
sasaran 1 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,71	72,18

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 72,71 % sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 72,18%, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang maka indikator tersebut telah mencapai target jangka menengah.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Kabupaten Sidenreng Rappang boleh disebut sebagai daerah yang sedang menikmati bonus demografi, seperti disampaikan pada bagian aspek demografi, sebab proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia belum dan tidak produktif. Seharusnya struktur penduduk tersebut bisa menjadi modal utama pembangunan daerah. Namun demikian, besarnya jumlah populasi penduduk tidak menjamin kemajuan pembangunan daerah, jika kualitas manusianya minim. Ukuran umum yang digunakan untuk menilai kualitas sumberdaya manusia sebuah negara/daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang dibangun dari tiga komponen yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang nilainya dikelompokkan menjadi empat kategori mulai dari IPM sangat tinggi dengan nilai lebih 80, IPM sedang 70 hingga 80 dan IPM rendah bernilai dibawah 60.

Data BPS Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir cukup baik dilihat dari nilai IPM yang konsisten meningkat. Pada tahun 2019, status IPM Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai kategori tinggi karena berhasil mencapai angka 71,05 dan kinerja tersebut meningkat pada tahun 2020 menjadi 71,21. Selanjutnya Pada Tahun 2021 mencatatkan IPM 71.54 dan terus mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 72,06 dan pada tahun 2023 mencapai angka 72,71. Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, maka capaian Kabupaten Sidenreng Rappang lebih rendah, seperti pada gambar berikut:

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7
Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 1

Sasaran	Indikator	Capaian Kineja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Kualitas SDM yang Inklusif dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	100,73	95,42	5

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini terdiri dari 5 program sebesar Rp.162.339.662.510,- dengan realisasi sebesar Rp.154.909.729.753,- atau 95,42%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100,73%, berarti tingkat efisiensi sebesar 5%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

Sasaran 2 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.8
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 1

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Pendidikan	Indeks	63,93	63,50	99,33%

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran 2 yaitu meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menunjukkan realisasi capaian indeks pendidikan 63,50 dari target 63,93 dan capaian kinerja yaitu sebesar 99,33% atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.9
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 1

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indeks Pendidikan	Indeks	62.54	62.94	63.50	99	99,97	99.33

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 2 Meningkatnya akses pelayanan bidang pendidikan belum mencapai target. Capaian Indikator pada sasaran ini dari tahun 2022 mengalami penurunan capaian menjadi 99,33%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.10
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 1 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Pendidikan	Indeks	63.50	63.93

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 63.50 % sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 63.93%, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut telah mencapai target jangka menengah.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Meningkatnya akses dan kualitas layanan pengelolaan Pendidikan disebabkan oleh diantaranya pro aktifnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencari informasi dan mendistribusikan kepada satuan pendidikan dan maksimalisasi perbaikan Data Pokok pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal untuk verifikasi anggaran DAK fisik maupun non fisik. Ditambah adanya program-program Prioritas Kepala Daerah untuk membantu seragam bagi siswa sehingga meningkatkan angka partisipasi Pendidikan di Kabupaten Sidrap.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.11
Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 2

Sasaran A	Indikator	Capaian Kineja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Akses dan Kualitas layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	99,97	97,27	2,7

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 program sebesar Rp.105.378.257.280,- dengan realisasi sebesar Rp. 102.498.598.078,- atau 97,27%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 99,9%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 2,7%.

- f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.
1. Program Pengelolaan Pendidikan;
 2. Program Pendidik dan Tenaga Kerja;

Sasaran 3 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.12
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 2

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Kesehatan	Indeks	77,34	78.06	100.93

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran 3 yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat menunjukkan realisasi capaian indeks Kesehatan 78.06 dari target 77,34 dan rata-rata capaian kinerja yaitu sebesar 100,93% atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.13
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 2

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indeks Kesehatan	Indeks	77,55	77,55	78,06	100	100	100.93

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 3 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat telah mencapai target. Capaian Indikator pada sasaran ini dari beberapa tahun yang lalu mengalami peningkatan sebesar 100,93%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.14
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 2 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Kesehatan	%	78,06	77,34

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 78,06% sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 77,34%, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang maka indikator tersebut telah melampaui capaian target jangka menengah.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Permasalahan yang dihadapi :

1. Terbatasnya tenaga, baik segi kuantitatif maupun kualitatif jika dibandingkan dengan jumlah penduduk
2. Sarana dan Prasarana serta Alat Kesehatan di bidang Kesehatan belum mencapai ideal.
3. Kondisi alam berupa Cuaca dan geografis yang memicu terjadinya bencana (banjir) di sebagian wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan banyaknya genangan air mempermudah perkembangbiakan nyamuk dan sumber penularan penyakit lainnya.

Solusi :

Terkait permasalahan yang dihadapi dan kondisi yang ada, maka diambil strategis dan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan pelayanan kesehatan secara efektif dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Sosialisasi dan Pembinaan secara intensif ke Puskesmas.
3. Memperkuat kerjasama lintas sektor dan pihak ketiga yang dapat mendukung pembangunan kesehatan.
4. Pengefektifan sistem keuangan dan anggaran.
5. Prioritas upaya kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif selain kuratif dan rehabilitatif.

Upaya yang dilakukan pencapaian peningkatan kinerja :

1. Optimalisasi deteksi dini resiko tinggi dan terlaksananya rujukan dini terencana pada Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas.
 2. Pendampingan Puskesmas untuk kegiatan rekrudisasi pada tahun 2021.
 3. Peningkatan peran aktif dalam rangka sosialisasi terhadap pentingnya kepesertaan JKN kepada masyarakat dan bekerja sama BPJS Kesehatan dan Lintas Sektor terakait.
 4. Optiomalisasi SDM dan Sarana Prasarana serta alat kesehatan pada pelayanan kesehatan secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
 5. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran peran serta masyarakat di bidang kesehatan.
- e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.15
Efesiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 2

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efesiensi
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	100,93	67,48	33,45

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini terdiri dari 3 program sebesar Rp.56.209.554.230,- dengan realisasi sebesar Rp.51.665.464.675,- atau 67,48%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100,93%, berarti tingkat efesiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 33,45%.

- f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan ;
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

Sasaran 4 : Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.16
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 4

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59,01	56,71	96,10

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran 4 yaitu meningkatnya Keberdayaan perempuan dalam Pembangunan menunjukkan realisasi 56,71 dari target 59.01 dengan rata-rata capaian kinerja yaitu sebesar 96,10% atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.17
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 4

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1 Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	33,21	53,84	56,71	58	96,38	96,10

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 4 Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan capaian kinerja dari tahun 2021 dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Sedangkan untuk tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 96,10%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.18
Perbandingan Target Realisasi sasaran 4

dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Pemberdayaan Gender	%	56,71	59,01

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 56,71% sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 59,01, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target jangka menengah.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Terwujudnya Pengarusutamaan Gener. Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan beberapa kegiatan sesuai anggaran yang tersedia, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A);
4. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
5. Evaluasi pelaksanaan PUG;
6. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.19
Efisiensi Pengguna Sumber Daya Sasaran 4

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender(IGD)	96,38	99,18	2,8

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk mendukung sasaran pencapaian

sasaran ini terdiri dari 2 program sebesar Rp.751.851.000,- dengan realisasi sebesar Rp.754.667.000,- atau 99,18%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 96,38%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 2,8%.

- f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.
1. Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
 2. Program Perlindungan Perempuan.

Sasaran 5 : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.20
Target Capaian Indikator Kinerja sasaran 5

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi	
PDRB perkapita ADHB	Juta Rupiah	51,26	55,51	108,29

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat menunjukkan realisasi PDRB perkapita AHB 55,51 dari target 51,26 sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100,29% atau dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.21
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 5

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
PDRB Perkapita ADHB	Juta Rupiah	47.19	51,00	55,51	100	100	108,29

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 5 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat capaian kinerja dari tahun ini dengan tahun lalu mengalami peningkatan realisasi tahun ini sebesar 55,51 dengan capaian sebesar 108,29%

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.22
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 5 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
PDRB Perkapita AHB	%	55,51	51,26

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 55,51% sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 51.26, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut telah melampaui capaian target jangka menengah.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

1. Capaian pada sektor pertanian :

- Adanya program pemerintah berupaya khusus melalui percepatan tanam yang anggarannya bersumber dari tugas pembantu serta pengadaan atau pembangunan sarana prasarana pertanian;
- Pembangunan Embun sebanyak 12 Unit;
- Pembangunan Irigasi Pompanisasi sebanyak 3 Unit;
- Pengawasan dan perencanaan pembangunan jalan tani sebanyak 4 paket;
- Pembangunan Dam dan Long Storage masing-masing unit.

2. Capaian pada sector Peternakan :

- Pencegahan dan penyakit menular ternak;
- Peningkatan produk hasil peternakan;
- Peningkatan Pemasaran hasil peternakan;
- Peningkatan penerapan pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan.

3. Capaian pada sector perikanan :

- Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya

kelautan;

- Pengembangan budidaya perikanan;
- Pengembangan Perikanan tangk ap;
- Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

4. Capaian pada sector UMKM :

- Guna Mendukung tumbuhnya UMKM pemerintah kabupaten Sidrap memberikan kemudahan dalam perizinan.
- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan guna peningkatan pengetahuan dan skill bagi masyarakat produktif untuk membuka lapangan kerja;

5. Capaian pada Sektor Tingkat Kemiskinan :

- Tercapainya penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial dengan jumlah presentase warga yang diberdayakan dan menerima perlindungan sosial;

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.33

Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 5

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita ADHB	100,29	89,91	10,38

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini terdiri dari 15 program sebesar Rp.40.966.515.760,- dengan realisasi sebesar Rp.36.831.955.437,- atau 89,91%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100,29%, berarti tingkat efisiensi sebesar 10,38%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2. Program penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian
3. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
4. Program pengelolaan perikanan budidaya
5. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
6. Program penyuluhan pertanian
7. Program pengembangan UMKM
8. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
9. Program Pemberdayaan Sosial

10. Program Rehabilitasi Sosial
11. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
12. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri
13. Program Penanganan Bencana
14. Program Hubungan Industri
15. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Sasaran 6 : Meningkatnya Produktivitas Sektor – Sektor Perekonomian Daerah

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.34
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 6

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi	
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,51-6,01	3,28	62,36

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidenreng Rappang

Indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Perekonomian Daerah menunjukkan realisasi sebesar 62,36 dari target 4,51-6,01 dan diperoleh capaian kinerja sebesar 62,36% atau dengan kriteria **Sangat Rendah**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.35
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 6

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi	%	-0.59	5.54	3,28	100	94,83	62,36

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 6 Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Perekonomian Daerah untuk tahun 2021

sampai tahun dengan tahun ini cenderung semakin menurun dengan capaian tahun ini sebesar 62,36 menunjukkan capaian sangat rendah.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.36
Perbandingan Target Realisasi sasaran 6
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Pertumbuhan Ekonomi	%	3,28	4,51 - 6,01

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 3,28 % sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 4,51-6,01%, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target jangka menengah.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 cenderung melambat. Pertumbuhan tertinggi sepanjang periode ini yaitu tahun 2021, dengan nilai sebesar 5,54 persen. Pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 4,65 persen, sampai mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -0,59 persen. Fenomena terkontraksinya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan menurunnya produksi pertanian sebagai sektor penopang perekonomian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2022, perekonomian kembali membaik yang ditandai dengan tumbuhnya perekonomian sebesar 4,86 persen. Angka ini juga melampaui target RKPD 2022 yang berada di range 4,39-5,86%. Hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 sudah mulai dapat dikendalikan dan meningkatnya produksi pertanian sebagai sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tidak lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, yang berada di angka 5,09 persen untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan 5,31 persen untuk Nasional di tahun 2022. Bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah setara yang nilainya sebesar 4,80 persen, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang masih berada di atas rata-rata.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.37
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 6

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Produktivitas Sektor-Sektor Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	62,36	92,57	30,21

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini terdiri dari 8 program sebesar Rp.9.385.293.500,- dengan realisasi sebesar Rp.8.687.955.143,- atau 92,57%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 62,36%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 30,21%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
3. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
4. Program pengelolaan perikanan budidaya
5. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
6. Program penyuluhan pertanian
7. Program pengembangan UMKM
8. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

Sasaran 7: menurunnya Angka Kemiskinan

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.38
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 7

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi	

Tingkat kemiskinan	%	3,17	5,14	37,85
--------------------	---	------	------	-------

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan menunjukkan realisasi 5,14 dari target 3,17 dan mencapai target yaitu sebesar 37,85% di tahun 2023 dengan kriteria **Sangat Rendah**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.39
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 7

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Tingkat kemiskinan	%	5,04	5,11	5,14	100	75,67	37,85

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 7 menurunnya angka kemiskinan cenderung semakin menurun dengan realisasi di tahun 2023 sebesar 5,14% dimana menunjukkan capaian yang sangat rendah sebesar 37,85 %.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.40
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 7 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Tingkat kemiskinan	%	5,14	3.17

Realisasi kinerja pada Indikator sampai dengan tahun ini sebesar Rp.5,14,- sedangkan target untuk jangka menengah sebesar Rp.3.17, perbandingan rata-rata

realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target jangka menengah.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Tercapainya sasaran "Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial" dapat diukur melalui indikator "Persentase Warga Negara yang Diberdayakan dan Menerima Perlindungan Sosial".

Beberapa kegiatan terlaksana dengan baik meskipun ada beberapa faktor yang menjadi penghambat sehingga kinerja realisasi kurang maksimal. Pada Indikator Jumlah Rumah Tangga Miskin yang menjadi penghambat yang pertama adalah kurangnya SDM tenaga pendamping profesional di bidang kesejahteraan sehingga diperlukan peningkatan kapasitas, penghambat yang kedua adalah tidak adanya rumah singgah untuk menampung sementara PPKS terlantar serta kurangnya anggaran untuk mendukung proses pendamping atau assesmen bagi calon penerima bantuan dalam hal ini Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Untuk perbaikan dimasa mendatang, terutama dalam rangka memenuhi administrasi transparan dan akuntabel serta menciptakan dan menjaga kesinambungan yang berkelanjutan dari suatu program diharapkan anggaran dapat ditingkatkan demi kelancaran tercapainya rencana kinerja kegiatan serta peningkatan akomodir capaian kinerja dan koordinasi dengan stakeholder yang terkait.

e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.41
Efesiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 7

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efesiensi
Menurunnya Angka kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	37,85	84,49	46,64

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini Pada indikator Tingkat Kemiskinan terdiri dari 4 program sebesar Rp.20.800.704.060,- dengan realisasi sebesar Rp.17.55.434.976,- atau 84,49%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 37,85%, berarti

tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 46,64

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Sasaran 8 : Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.42
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 8

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi	
1 Gini Ratio	Poin	0.328	0.345	94,82

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran Menurunnya Ketimpangan Distribusi pendapatan menunjukkan realisasi 0.345 dari target 0.328 dan mencapai target yaitu sebesar 94,82% di tahun 2023 dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.43
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 8

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Gini Ratio	Poin	0.358	0.354	0.345	96	94,33	94,82

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi capaian Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 8 Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan untuk tahun 2021 sebesar

96 %, di tahun 2022 menurun dengan capaian 94,33 sedangkan di tahun 2023 cenderung semakin menurun dengan capaian sebesar 94,82%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.44
Perbandingan Target Realisasi sasaran 8
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Gini Ratio	Poin	0.345	0.328

Realisasi kinerja pada Indikator sampai dengan tahun ini sebesar 0.345 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 0.328 perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut telah mencapai target jangka menengah.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Gini Rasio digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk, angka koefisien gini berkisar antara 0-1, semakin mendekati 0 nilai gini, semakin tidak timpang pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah.

Tingkat ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir mengalami tren penurunan. Di tahun 2021, indeks gini menyentuh angka 0,358 poin tertinggi selama lima tahun terakhir dan mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 0.354 dan 0.345 poin, yang berarti ketimpangan pendapatan masyarakat semakin rendah. Sedangkan di tahun 2023 rasio gini Kabupaten Sidenreng Rappang turun dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar 0.35 poin. salah satu factor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan yaitu Kesenjangan antara penduduk antara yang kaya dan miskin semakin melebar.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.45
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 8

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Gini Rato	94,82	98.03	3,21

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini dari 3 program sebesar Rp.10.780.518.200,- dengan realisasi sebesar Rp.10.568.565.318,- atau 98,03%. Dibanding dengan capaian kinerja sebesar 94.82% , berarti Efisiensi dalam Penggunaan Sumber Daya sebesar 3,21%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Program Penanganan Bencana
- Program Hubungan Industri
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Sasaran 9 : Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.46
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 9

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi	
1 Tingkat pengangguran Terbuka	%	5.65	3,29	141.77

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Penerapan Tenaga Kerja menunjukkan realisasi sebesar 3,29 dari target 5.65 dengan capaian Kinerja sebesar 141.77% atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.47
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 9

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1 Tingkat Pengangguran Terbuka	Poin	4.93	3,56	3,29	119	138	141,77

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja pada sasaran Strategis Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja untuk tahun 2021 sampai tahun 2022, dimana menunjukkan realisasi cenderung meningkat sedangkan di tahun 2023 mengalami kenaikan lagi sebesar 141,77%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.48
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 9 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,29	5.65

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 3,29 % sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 5.65%, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut telah melampaui target jangka menengah.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
- Besaran pekerja/buruh yang menjadi Program jaminan Sosial;
 - Persentase UMKM yang meningkat volume usahanya setelah diberdayakan.
 - Peningkatan produktivitas terhadap daya saing koperasi dan UMKM dengan

fasilitasi sarana bagi usaha mikro kecil.

- Meningkatnya keterampilan masyarakat dengan adanya Balai Latihan Kerja serta beberapa lembaga swasta.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.49
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 9

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	141,77	79,24	62,53

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini terdiri dari 4 program sebesar Rp.3.226.390.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.556.621.754,- atau 79,24%. Dibandingkan dengan capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 141,77%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 62,53%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas
- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata

Sasaran 10 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Daerah

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.50
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 10

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023(%)
		Target	Realisasi	

Nilai Investasi	Rupiah (Triliun)	3,946,04	4,418032	105.94
-----------------	------------------	----------	----------	--------

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Daerah menunjukkan realisasi Nilai Investasi sebesar Rp/Triliun 4,418032,- dari target Rp 3,946,04,- dengan capaian kinerja yaitu sebesar 105,94% dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.51
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 10

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Nilai Investasi	Rp Triliun	3,563,15	4,468,56	4.18032	98,56	118,19	105,94

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 10 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk tahun 2021 sampai tahun 2022, dimana menunjukkan capaian sangat tinggi, Sedangkan untuk Tahun 202 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 105,94%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengantahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.52
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 10 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Nilai Investasi	Rp Triliun	4,18032	3,964,04,-(Triliun)

Perbandingan realisasi indikator kinerja Nilai Investasi terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan telah mencapai target jangka menengah.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

No.	Sektor Usaha	Nilai Investasi (Rp)
1.	<i>Pertanian, Perikanan, Kehutanan</i>	47.025.300.000
2.	<i>Pertambangan dan penggalian</i>	17.279.800.000
3.	<i>Industry Pengolahan</i>	121.912.790.472
4.	<i>Pengadaan Listrik, gas, uap air/panas dan udara</i>	45.000.000
5.	<i>Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi</i>	90.000.000
6.	<i>Konstruksi</i>	323.723.500.030
7.	<i>Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor</i>	262.964.938.811
8.	<i>Pengangkutan dan Pergudangan</i>	8.457.000.000
9.	<i>Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum</i>	17.252.000.000
10.	<i>Informasi dan Komunikasi</i>	1.832.450.000
11.	<i>Aktifitas Keuangan dan Asuransi</i>	1.278.000.000
12.	<i>Real Estat</i>	11.225.000.000
13.	<i>Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis</i>	6.300.050.001
14.	<i>Aktifasi Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya</i>	16.796.500.000
15.	<i>Pendidikan</i>	211.000.000
16.	<i>Aktifitas Kesehatan Manusia dan Aktifitas Sosial</i>	62.395.000.000
17.	<i>Kesenian, Hiburan dan Rekreasi</i>	5.225.000.000
18.	<i>Aktivitas Jasa Lainnya</i>	1.401.000.000
Jumlah		905.414.329.314

Tabel 3.53
Klasifikasi Sektor Investasi PMDN

- Pengembangan strategi dan instrument promosi yang mencitrakan dan memperkuat *brand image* Sidenreng Rappang sebagai daerah dengan iklim investasi bidang agribisnis yang kondusif sesuai dengan visi penanaman modal.
- Secara geografis, demografis, dan topografis Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi dan beraneka ragam yang apabila dikelola secara terpadu dan komprehensif, dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang sangat tinggi

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Daerah	Nilai Investasi	105,94	79,24	26,7
--	-----------------	--------	-------	------

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini pada indikator Nilai Investasi terdiri dari 4 program sebesar Rp.3.226.390.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.556.621.754,- atau 79,24%. Dibandingkan dengan capaian kinerja pada Indikator ini sebesar 105,94%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 26,7%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata

Sasaran 11 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.55
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 11

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi	
Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Serta Konstruksi (ADHK)	%	5,81-7,71	1,077	15,93

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan menunjukkan realisasi sebesar 1,077 dari target 5,81-7,71 dan capaian target yaitu sebesar 15,93% atau tercapai dengan kriteria ***Sangat Rendah.***

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.56
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 11

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1 Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Serta Konstruksi (ADHK)	%	1.67	1,61	1,077	37	36,59	15,93

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 11 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan untuk tahun 2020 sampai tahun 2023, dimana menunjukkan capaian semakin rendah. Untuk Tahun 2023 lebih mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 15,93 %.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.57
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 11 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan	Kondisi Kinerja Target
Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Serta Konstruksi (ADHK)	%	1,077	5,81-7.71

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 1,077 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 5,81-7,71 perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja pada sasaran Stretgis 12 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas untuk tahun 2021 sampai tahun 2023, dimana menunjukkan cenderung menurun. Ditahun 2023 menunjukkan capaian realisasi sebesar 97,42%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.61
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 12 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	75.23	77.22

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 75.23 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 77.22, perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

- Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik;
- Persentase Drainase dalam kondisi baik/ Pembungan Aliran air tidak tersumbat;
- Persentase bangunan ber-IMB;
- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap;
- Ketersediaan rumah layak huni;
- Persentase penduduk berakses air minum yang layak;
- Persetase warga yang memperoleh layanan Pengolahan air limbah domestik.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.62
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 12

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah yang	Indeks Layanan	97,42	93,77	3,65

Berkualitas	Infrastruktur			
-------------	---------------	--	--	--

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini pada indikator Indeks Layanan Infrastruktur terdiri dari 7 program sebesar Rp.80.928.990.200,- dengan realisasi sebesar Rp.75.883.851.427,- atau 93,77%. Dibandingkan dengan capaian kinerja pada indikator ini sebesar 97,42%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 3,65%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

1. Program Penyelenggaraan Jalan;
2. Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Sasaran 13 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.63
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 13

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67.48	65,79	97,50

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup menunjukkan realisasi sebesar 65,79 dari target 67.48 dan diperoleh capaian kinerja sebesar 97,50% atau dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Penegakan hukum lemah, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Perda Lingkungan Hidup dan resiko bencana akibat penurunan kualitas lingkungan.
4. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan pengawsan dan melakukan kajian yang mendalam terhadap permasalahan-permasalahan.

Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan dalam peningkatan kinerja capaian sasaran adalah senagai berikut :

1. Menegakkan integritas dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan seluruh stakeholder dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam implementasi produk hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan
2. Peningkatan kapaasitas perangkat daerah di Bidang lingkungan hidup, salah satu yang dapat dlakukan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk perangkat daerah tentang teknologi pengelolaan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat
3. Melakukan kajian ilmiah terhadap status lingkungan hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dasar atau rujukan dalam pengambilan keputusan
4. Mendorong ketertiban aktif masyarakat dan pelaku peduli dalam konservasi, preservasi dan rehabilitasi pada basis wilayah baik di kawasan hulu / pegunungan dan lahan kritis, kawasan dataran rendah.

e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.66
Efesiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 13

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efesiensi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,79	86,54	20,75

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk mendukung sasaran pencapaian sasaran ini pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 3 program sebesar Rp.10.412.033.300,- dengan realisasi sebesar Rp.9.010.811.671,- atau 86,54%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 65,79%, berarti tingkat efesiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 20,75%.

Tabel 3.64
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 13

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65.54	66.55	65,79	100	99,46	97.50

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator ini dengan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 65.79 sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 97,50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengantahun ini dengan target jangka menengah yangterdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.65
Perbandingan Target Realisasi sasaran 13
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH)	Indeks	65.79	67.48

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 66.79 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 67.48, perbandingan realisasi indicator kinerja sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan Kinerja yang terjadi dari tahun 2022 ke tahun 2023 dipengaruhi berbagai hal, diantaranya adalah :

1. Alih fungsi lahan menjadi usaha penambangan dan tidak adanya reklamasi lahan pasca galian tambang, sehingga meningkatkan potensi banjir, penurunan kualitas air akibat pestisida dari lahan peertanian.
2. Penanganan sampah dan drainase / got limbah rumah tangga belum terkelola dengan baik.

- f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
 3. Program Pengelolaan Persampahan.

Sasaran 14 : Meningkatkan Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.67
Target Capaian Indikator Kinerja sasaran 14

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2023 (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,11 (BB)	48.74	63.21

Sumber data : Bagian Organisasi Kab.Sidrap

Dari realisasi Indikator kinerja yang mendukung sasaran 14 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik menunjukkan realisasi sebesar 48.74 dari target 71,11 (BB) dan Capaian Kinerja sebesar 63,21% atau tercapai dengan kriteria **Sangat Rendah**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.68
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 14

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50.15	54.80	48,74	94	84,59	63.21

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator ini dengan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 48.74 sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 63,21%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.69
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 14 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	48.74	71.11

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 48,74 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 71.11, perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Terdapat hampir semua indikator pada pelaksanaan RB tidak memiliki skor/nilai sehingga untuk indeks di tahun ini mengalami penurunan dibanding hasil dari tahun lalu.

Untuk dapat lebih mewujudkan birokrasi yang mencapai sasaran adapun upaya perbaikan diantaranya melakukan monev terhadap perkembangan implementasi reformasi birokrasi dengan menyusun peta keterkaitan kebijakan, melaksanakan internalisasi budaya kerja ASN BerAkhlak. Dalam hal peningkatan kualitas reformasi birokrasi Hasil evaluasi dari Kemenpan RB selalu jadi pedoman untuk di tindak lanjuti berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik, birokrasi yang bersih dan akuntabel yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.70
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 14

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	63,21	38,90	24,31

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk mendukung sasaran pencapaian

sasaran ini terdiri dari 7 program sebesar Rp.92835988.300,- dengan realisasi sebesar Rp.36.117.058.595,- atau 38,90%. Dibandingkan dengan capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 63,21%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 24,31%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.

1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
7. Program Aplikasi Informatika

Sasaran 15 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.71
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 15

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023(%)
		Target	Realisasi	
Nilai SAKIP	Poin	78,78(BB)	64,25	81,56%

Sumber data : Bagian Organisasi Setda Kab.Sidrap

Indikator kinerja sasaran Nilap SAKIP dengan realisasi 64,25 dari target 78,78 dan telah mencapai kinerja sebesar 81,56% atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.72
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 15

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Nilai SAKIP	Poin	61.37	63.53	64,25	94	88,90	81,56

Sumber data : Bagian Organisasi Setda Kab.Sidrap

Untuk realisasi indikator sasaran Nilai SAKIP untuk tahun 2023 menunjukkan peningkatan realisasi sebesar 64,25 dengan capaian 81,56 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 61.37 Sedangkan Untuk capaian pada tahun 2021 sebesar 94% lebih lebih tinggi dibandingkan capaian di tahun 2022 sebesar 88,90% di karenakan target pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.73
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 15 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Nilai SAKIP	Poin	64,25	78.78

Perbandingan Realisasi kinerja sampai tahun ini sebesar 64,25 seangkan kondisi kinerja target jangka menengah sebesar 78.78, perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 mencapai nilai 64,25 dengan predikat B, mengalami kenaikan nilai jika dibandingkan capaian kinerja sasaran pada tahun 2022.

Upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah yaitu

- Mereviu dokumen perencanaan agar sasaran dan indikator kinerja lebih berorientasi hasil.
- Melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi indikator kinerja.

- Penyusunan laporan kinerja menyajikan realisasi kinerja yang telah sebelumnya diperjanjikan.
- Hasil evaluasi oleh inspektorat harus menjadi umpan balik perbaikan kedepannya bagi perangkat Daerah.

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), mencapai target dikarenakan:

- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan;
- Pelaporan keuangan telah berbasis Akrual (Accrual Basis) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang;
- Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
- Akses pengelolaan keuangan tertib, efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, laporan disusun secara tepat waktu dan laporan disusun sesuai standar yang berlaku.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.74
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 15

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah Daerah	Nilai saki	81,56	79,49	2,7

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini pada indikator ini terdiri dari 3 program sebesar Rp.2.406.481.500,- dengan realisasi sebesar Rp.1.912.905.923,- atau 79,49%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 81,56%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini

adalah sebesar 2,7 %.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

1. Program Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Sasaran 16 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.75
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 16

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023(%)
		Target	Realisasi	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,35	77.41	87.62

Sumber data : Bappelitbagngda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran ini menunjukkan realisasi sebesar 77,41 dari target 88,35 dengan capaian kinerja yaitu sebesar 87,62% atau dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.76
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 16

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76.96	78.85	77,41	100	93,51	87,62

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Perbandingan Capaian kinerja untuk indikator ini dengan cenderung mengalami penurunan di tiap tahunnya. Capaian realisasi pada tahun ini menunjukkan sangat menurun dengan capaian sebesar 87,62%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.77
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 16 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	77,41	88,35

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 78,85 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 88,35, perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Kualitas pelayanan public masih perlu di tingkatkan sebagai bentuk siap, yang diperoleh dengan cara membandingkan persepsi penerima layanan dan atas layanan yang nyata. Dalam factor pengukuran kualitas pelayanan agar pelayanan mempunyai persepsi yang baik terhadap penerima layanan. Di tahun ini indeks kepuasan masyarakat mengalami peningkatan hal ini disebabkan kinerja pelayanan yang terus ditingkatkan oleh beberapa instansi pemerintah dengan penanganan dan pengaduan sudah dilakukan secara online, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Adapun pengaduan secara tidak langsung hal tersebut menjadi penilaian dari pengguna pelayanan publik, dimana dapat dijadikan pemacu dalam meningkatkan pelayanan yang baik dan cepat dengan adanya keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki dengan tanggungjawab yang mesti diberikan kepada masyarakat yang dilayani.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.78
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 16

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,62	36,04	51,58

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini pada indikator pertama terdiri dari 3 program sebesar Rp.87.732.709.300,- dengan realisasi sebesar Rp.31.617.907.138,- atau 36,04%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 87,62%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 51,58%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

1. Program Pelayanan Penanaman Modal
2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran 17 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.79
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 17

	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,60	2,87	110.38

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran ini menunjukkan realisasi sebesar 2,87 dari target 2,60 dengan capaian kinerja yaitu sebesar 110.38% atau dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.80
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 17

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,78	2,32	2,87	81	97,48	110.38

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Stretgis 17 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) pada Indikator ini cenderung meningkat. Untuk tahun 2021 realisasi indikator sebesar 1.78 dengan capaian sebesar 81%. Di tahun 2022 peningkatan dengan Capaian sebesar 97,48%, sedangkan untuk tahun 2023 mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 110,38%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.81
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 17 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,87	2,60

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 2,87 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 2.60 perbandingan realisasi indikator kinerja sampai

dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

- Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP
- Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama
- Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.82
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 17

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	110.38	95,90	14,48

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini pada indikator pertama terdiri dari 1 program sebesar Rp.2.696.797.500, dengan realisasi sebesar Rp.2.586.245.534,- atau 95,90%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 110,38%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 14,48%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

1. Program Aplikasi Informatika

Sasaran 18 : Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.83
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 18

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
		Target	Realisasi	

Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7854	0,7974	101.53
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran ini menunjukkan realisasi sebesar 0,7974 dari target 0,7854 dengan capaian kinerja yaitu sebesar 101,53% atau dengan kriteria ***Sangat Tinggi***.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.84
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 18

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7278	0,7825	0.7974	100	103,96	101.53

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Stretgis 18 Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2021 realisasi indikator sebesar 0.7278 dengan capaian sebesar 100%. Dan untuk tahun 2022 mengalami peningkatan realisasi 0,7825 dengan capaian 103,96%.Sedangkan di tahun 2023 realisasi capaian mengalami sedikit penurunan dengan capaian sebesar 101,53%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.85
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 18 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7974	0,7854

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 0.7974 sedangkan

target untuk jangka menengah sebesar 0.7854 perbandingan realisasi indicator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut telah mencapai target.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

- Persentase Peningkatan Perkembangan Desa
- Persentase Pengentasan Desa Tertinggal
- Persentase Desa/Kelurahan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif
- Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.86
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 18

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	101.53	48,22	53,31

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini pada indikator ini terdiri dari 4 program sebesar Rp.712.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.485.400.600,- atau 68,13%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 101,53%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 53,31%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

1. Program Penataan Desa
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ,Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Sasaran 19 : Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri

- a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.87
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 19

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi	
1 Persentase Desa Maju dan Mandiri	Indeks	85.29	91.18	106.90

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran ini menunjukkan realisasi sebesar 85,29 dari target 85,29 dengan capaian kinerja yaitu sebesar 106.90% atau dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.88
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 19

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1 Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	%	70,59	75.00	91.18	105	111,76	106.90

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Stretgis 19 Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri pada Indikator ini di Tahun 2020 belum ada penetapan indikator sehingga belum ada realisasi dan capaian indikator. Pada tahun 2021 realisasi indikator sebesar 70.59% dengan capaian sebesar 105%. Dan untuk 2022 mengalami peningkatan realisasi sebesar 75.00 % dengan capaian sebesar 111,76%. Sedangkan untuk tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 106,90%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.89
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 19 presentase desa maju dan mandiri

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	91.18	85,29

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 91.18 sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 85.29 perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

- Persentase Peningkatan Perkembangan Desa
- Persentase Pengentasan Desa Tertinggal
- Persentase Desa/Kelurahan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif
- Persentase Peningkatan Perkembangan Desa
- Persentase Desa Tertinggal

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.90
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 19

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	Persentase Desa Maju dan Mandiri	106.90	46,31	60,59

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini pada indikator pertama terdiri dari 2 program sebesar Rp.1.526.627.300, dengan realisasi sebesar Rp.706.927.460,- atau 46,31%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 106,90%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 60,59%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sasaran 20 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Sosial masyarakat yang Religius dan Berbudaya

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.91
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 20

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2023(%)
		Target	Realisasi	
1 Angka Kriminalitas	Kasus	339	730	-15,34

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran ini menunjukkan realisasi sebesar 730 dari target 339 dengan capaian kinerja yaitu sebesar 15,24% atau dengan kriteria **Sangat Rendah**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.92
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 2022

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1 Angka Kriminalitas	Kasus	400	621	730	88	21,04	15.34

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Stretgis 20 Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius dan berbudaya tahun 2021 realisasi indikator sebesar 400 kasus dengan capaian sebesar 84%.

Di tahun 2022 realisasi bertambah sebesar 621 kasus dengan capaian realisasi sebesar 21,04%. Sedangkan pada tahun 2023 lebih melonjak sebesar kasus 730 dengan capaian sebesar 15,34%

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.93
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 20 Angka Kriminalitas

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Angka kriminalitas	Kasus	730	339

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 730 kasus sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 339 kasus perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja faktor penyebab peningkatan sebagai berikut ;
1. Koordinasi yang berjalan optimal/maksimal di antara pemangku kepentingan dalam menangani dan menyelesaikan setiap permasalahan di lapangan.
 2. Sarana pendukung kegiatan yang memadai
 3. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya ketertiban, ketentraman dan keindahan.
 4. Ketersediaan anggaran dalam anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut
 5. Sarana/fasilitas perlengkapan pendukung kegiatan yang memadai

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.94
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 20

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan keamanan dan ketertiban serta kualitas	Angka Kriminalitas	15,34	30,74	15,06

kehidupan sosial masyarakat yang religius dan berbudaya				
---	--	--	--	--

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini pada indikator Angka Kriminalitas yang terdiri dari 5 program sebesar Rp. 25.793.000.300,- dengan realisasi sebesar Rp.7.927.482.150,- atau 30,74%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 15,34%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 15,06%.

f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program Pencegahan, penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas Dan Fasilitasi penangan konflik Sosial.
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
5. Program Pemerintah dan kesejahteraan Rakyat

Sasaran 21 : Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.95
Target Capain Indikator Kinerja sasaran 21

	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Persen	76,11	87.40	114.83

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada sasaran ini menunjukkan realisasi sebesar 87.40 dari target 76,11 dengan capaian kinerja yaitu sebesar 114.83% atau dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.96
Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis 21

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1 Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	72.00	74.07	87.40	97	98,85	114.83

Sumber data : Bappelitbangda Kab.Sidrap

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Stretgis 21 Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat pada tahun 2021 realisasi indikator sebesar 72.00% dengan capaian sebesar 97%. Untuk tahun 2022 peningkatan realisasi sebesar 74.07 dengan capaian kinerja sebesar 98,85%. Sedangkan untuk tahun 2023 mengalami lagi peningkatan dengan capaian sebesar 114,83%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.97
Perbandingan Target Realisasi
sasaran 21 Angka Kriminalitas yang Tertangani

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	87.40	76.11

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 74.07% sedangkan target untuk jangka menengah sebesar 76.11% perbandingan realisasi indicator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut belum mencapai target.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
- Persentase Warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda
 - Persentase warga yang memperoleh penyelamatan dan Evakuasi korban
 - Persentase koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah
 - Persentase sarana dan prasarana Olahraga yang memadai.
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.98
Efisiensi Pengguna Sumber Daya sasaran 21

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	Angka Kriminalitas yang Tertangani	114,83	30,74	84,09

Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini pada indikator pertama terdiri dari 5 program sebesar Rp.25.793.000.300,- dengan realisasi sebesar Rp.7.927.482.150,- atau 30,74%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 114,83%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 84,09%.

- f. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan
1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 2. Program Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas Dan Fasilitasi penanganan konflik Sosial.
 4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 5. Program Pemerintah dan kesejahteraan Rakyat

3.3 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mendukung terwujudnya pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis dan indikator kinerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.99

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
1.	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	Rp. 162.339.662.510	154.909.729.753	95,42
2	INDEKS PENDIDIKAN	Rp. 105.378.257.280	102.498.598.078	97,27
	- Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 94.350.931.180	91.543.977.678	97,02
	- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 11.027.326.100	10.954.620.400	99,34
3	INDEKS KESEHATAN	Rp. 56.209.554.230	51.665.464.675	67,48
	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 54.458.174.230	50.363.317.058	91,48
	- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 1.703.340.000	1.254.239.617	73,63
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 48.040.000	47.908.000	99,73
4	INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	Rp. 751.851.000	745.667.000	99,18
	- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 727.851.000	727.667.000	99,97
	- Program Perlindungan Perempuan	Rp. 24.000.000	18.000.000	75,00
5	PDRB PERKAPITA AHB	Rp. 40.966.515.760	36.831.955.437	89,91

6	PERTUMBUHAN EKONOMI	Rp.	9.385.293.500	8.687.955.143	92,57
-	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	2.114.769.000	2.006.609.250	94,89
-	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	1.388.326.000	1.291.911.335	93,06
-	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.	198.531.500	63.114.992	31,79
-	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.	240.231.000	202.878.423	84,45
-	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp.	6.500.000	3.612.000	55,57
-	Program Penyuluhan Pertanian	Rp.	445.331.000	335.078.100	75,24
-	Program Pengembangan UMKM	Rp.	4.641.142.000	4.634.288.743	99,85
-	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	350.463.000	150.462.300	42,93
7	TINGKAT KEMISKINAN	Rp.	20.800.704.060	17.575.434.976	84,49
-	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	993.251.000	148.683.700	14,97
-	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	268.340.000	38.193.500	14,23
-	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	140.001.060	371.253.700	265,18
-	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	19.399.112.000	17.017.304.076	87,72
8	GINI RATIO	Rp.	10.780.518.200	10.568.565.318	98,03
-	Program Penanganan Bencana	Rp.	139.452.200	40.657.000	29,15
-	Program Hubungan Industri	Rp.	1.469.453.000	1.459.062.695	99,29

	- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	9.171.613.000	9.068.845.623	98,88
9	TINGKAT PENGGANGGURAN TERBUKA (TPT)	Rp.	3.226.390.000	2.556.621.754	79,24
10	NILAI INVESTASI	Rp.	3.226.390.000	2.556.621.754	79,24
	- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	228.750.000	151.875.099	66,39
	- Program Promosi Penanaman Modal	Rp.	85.300.000	15.000.000	17,58
	- Program Peningkatan Daya Tark Destinasi Pariwisata	Rp.	2.777.500.000	2.225.380.155	80,12
	- Program Pemasaran Pariwisata	Rp.	134.840.000	164.366.500	121,90
11	PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG, TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN, SERTA KONSTRUKSI (ADHK)	Rp.	11.121.624.875	10.325.059.563	92,84
	- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.	5.360.970.800	5.302.450.426	98,91
	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.	604.000.000	598.876.906	99,15
	- Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	5.156.654.075	4.423.732.231	85,79
12	INDEKS LAYANAN INFRASTRUKTUR	Rp.	80.928.990.200	75.883.851.427	93,77
	- Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	77.312.719.700	72.479.921.565	93,75
	- Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Rp.	190.530.000	66.316.925	34,81
	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	1.039.275.500	1.008.384.783	97,03
	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.	2.386.465.000	2.329.228.154	97,60
13	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	Rp.	10.412.033.300	9.010.811.671	86,54

	- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	90.709.600	64.187.145	70,76
	- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp.	1.822.024.600	1.612.981.000	88,53
	- Program Pengelolaan Persampahan	Rp.	8.499.299.100	7.333.643.526	86,29
14	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Rp.	92.835.988.300	72.923.047.145	78,55
15	NILAI SAKIP	Rp.	2.406.481.500	1.912.905.923	79,49
	- Program Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	178.713.000	150.000.000	83,93
	- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.	429.425.000	361.306.923	84,14
	- Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	1.798.343.500	1.401.599.000	77,94
16	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	Rp.	87.732.709.300	68.423.895.688	77,99
	- Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	352.578.200	186.649.300	52,94
	- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	70.780.600	60.798.000	85,90
	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	58.500.000	30.866.200	52,76
17	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	Rp.	2.696.797.500	2.586.245.534	95,90
	- Program Aplikasi Informatika	Rp.	2.696.797.500	2.586.245.534	95,90
18	INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)	Rp.	712.500.000	485.400.600	68,13
	- Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp.	12.500.000	9.090.000	72,72
	- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.	700.000.000	476.310.600	68,04
19	PERSENTASE DESA MAJU DAN MANDIRI (IDM)	Rp.	1.526.627.300	706.927.460	46,31

	- Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	502.500.000	345.514.796	68,76
	- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	1.024.127.300	361.412.664	35,29
20	ANGKA KRIMINALITAS	Rp.	25.793.000.300	20.196.145.000	78,30
21	ANGKA KRIMINALITAS YANG TERTANGANI	Rp.	25.793.000.300	20.196.145.000	78,30
	- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	2.231.154.000	1.958.067.750	87,76
	- Program Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.	4.360.289.000	5.284.066.700	121,19
	- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	770.710.000	685.347.700	88,92
	- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saaing Keolahragaan	Rp.	6.169.117.000	5.648.591.150	88,92
	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	3.091.641.000	2.128.959.036	53,99

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN 2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1,257,309,100,00.00,- . Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi - strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2023 diarahkan kepada:

1. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional;
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja;
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Upaya-upaya efektif dalam penggalan sumber - sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber- sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan kedalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN		2023			2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
	PENDAPATAN – LRA	1,218,710,946,000.00	1,196,127,072,936.13	98.15	1,172,625,829,994.00
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	180,638,848,000.00	171,316,137,750.00	94.84	161,869,158,604.00
	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	57,536,000,000.00	48,396,308,690.00	84.11	45,748,269,948.00
	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	12,384,153,000.00	9,754,628,058.00	78.77	11,429,337,082.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	6,000,000,000.00	5,693,280,114.00	94.89	5,753,407,858.00
	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	104,718,695,000.00	107,471,920,888.00	102.63	98,938,143,716.00
B.	PENDAPATAN TRANSFER – LRA	1,032,956,658,000.00	1,022,896,935,186.13	99.03	1,004,399,130,861.00
-	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA</i>	<i>858,439,991,000.00</i>	<i>849,950,316,995.00</i>	<i>99.01</i>	<i>855,889,932,797.00</i>
	- Dana Bagi Hasil (DBH) – LRA	11,345,560,000.00	13,865,573,322.00	122.21	25,432,636,660.00
	- Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	603,941,085,000.00	603,688,474,857.00	99.96	573,170,002,200.00
	- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	73,267,789,000.00	67,007,107,568.00	91.46	127,332,211,031.00
	- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- LRA	169,885,557,000.00	165,389,161,248.00	97.35	129,955,082,906.00
-	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- LRA</i>	<i>79,704,827,000.00</i>	<i>81,799,457,000.00</i>	<i>102.63</i>	<i>67,226,412,000.00</i>
	- Dana Penyesuaian	79,704,827,000.00	81,799,457,000.00	102.63	67,226,412,000.00
-	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LRA</i>	<i>94,811,840,000.00</i>	<i>91,147,161,191.13</i>	<i>96.13</i>	<i>81,282,786,064.00</i>
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	79,811,840,000.00	80,388,580,691.13	100.72	74,487,667,770.00
	- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya – LRA	15,000,000,000.00	10,758,580,500.00	71.72	6,795,118,294.00
C.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5,115,440,000.00	1,914,000,000.00	37.42	6,357,540,529.00
	Pendapatan Hibah - LRA	5,115,440,000.00	1,914,000,000.00	37.42	6,357,540,529.00
	Pendapatan Lainnya - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00

Rincian Pendapatan Pajak Daerah

NO	URAIAN	2023			2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1	Pajak Hotel	200,260,000.00	90,142,000.00	45.01	81,380,000.00
2	Pajak Restoran	2,500,000,000.00	1,782,428,397.00	71.30	1,361,172,707.00
3	Pajak Hiburan	200,000,000.00	65,084,250.00	32.54	142,703,200.00
4	Pajak Reklame	1,000,000,000.00	651,194,795.00	65.12	549,687,744.00
5	Pajak Penerangan Jalan	26,885,740,000.00	21,643,979,866.00	80.50	20,083,128,193.00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,250,000,000.00	306,716,636.00	24.54	446,173,600.00
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	14,000,000,000.00	11,386,249,101.00	81.33	11,449,976,653.00
8	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11,500,000,000.00	12,470,513,645.00	108.44	11,634,047,851.00
	- BPHTB-Pemindahan Hak	10,850,000,000.00	10,252,301,345.00	94.49	11,114,015,651.00
	- BPHTB-Pemberian Hak Baru	650,000,000.00	2,218,212,300.00	341.26	520,032,200.00
	Jumlah	57,536,000,000.00	48,396,308,690.00	84.11	45,748,269,948.00

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

NO	URAIAN	2023			2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,181,500,000.00	2,031,311,192.00	171.93	2,886,341,368.00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	575,000,000.00	473,460,000.00	82.34	459,060,000.00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300,000,000.00	202,900,000.00	67.63	203,900,000.00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	6,000,000,000.00	4,996,714,905.00	83.28	6,089,151,334.00
	- <i>Retribusi Pelataran</i>	2,099,088,360.00	2,435,143,735.00	116.01	2,026,078,737.00
	- <i>Retribusi Los</i>	2,089,039,950.00	1,205,775,425.00	57.72	2,001,154,985.00
	- <i>Retribusi Kios</i>	1,811,871,690.00	1,355,795,745.00	74.83	2,061,917,612.00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	300,000,000.00	155,205,000.00	51.74	261,850,000.00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	60,000,000.00	73,808,000.00	123.01	73,657,500.00

7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	542,740,000.00	492,113,000.00	90.87	463,636,000.00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	400,000,000.00	189,658,324.00	47.41	165,696,000.00
	- <i>Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan</i>	30,000,000.00	68,508,324.00	228.36	40,100,000.00
	- <i>Retribusi Pemakaian Laboratorium</i>	70,000,000.00	5,300,000.00	7.57	10,866,000.00
	- <i>Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor</i>	150,000,000.00	94,700,000.00	63.13	85,500,000.00
	- <i>Retribusi Pemakaian Alat</i>	150,000,000.00	21,150,000.00	14.10	29,230,000.00
9	Retribusi Terminal	125,000,000.00	100,350,000.00	80.28	93,375,000.00
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	119,913,000.00	128,287,000.00	106.98	145,634,000.00
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	20,000,000.00	6,705,000.00	33.53	5,220,000.00
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	100,000,000.00	10,000,000.00	10.00	28,252,000.00
13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	155,000,000.00	57,750,000.00	37.26	129,300,000.00
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2,500,000,000.00	833,540,637.00	33.34	420,438,880.00
15	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman			0.00	0.00
16	Retribusi Izin Trayek	5,000,000.00	2,825,000.00	56.50	3,825,000.00
	Jumlah	12,384,153,000.00	9,754,628,058.00	78.77	11,429,337,082.00

Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	2023			2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	Realisasi
1	Perusahaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PT Bank Sulselbar	6,000,000,000.00	5,693,280,114.00	94.89	5,753,407,858.00
	Jumlah	6,000,000,000.00	5,693,280,114.00	94.89	5,753,407,858.00

Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

NO	URAIAN	2023			2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	3,500,000,000.00	12,000,000.00	0.34	34,775,000.00
	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
	Hasil Penjualan Aset Lainnya	3,500,000,000.00	12,000,000.00	0.34	34,775,000.00
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	900,000,000.00	190,075,000.00	21.12	260,475,000.00
	Hasil Sewa BMD	600,000,000.00	90,000,000.00	15.00	90,600,000.00
	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	300,000,000.00	100,075,000.00	33.36	169,875,000.00
3	Hasil Kerjasama Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Penerimaan Jasa Giro	1,775,000,000.00	1,704,570,011.00	96.03	928,573,331.00
	Jasa Giro Kas Daerah	1,775,000,000.00	1,704,570,011.00	96.03	928,573,331.00
	Jasa Giro Bendahara	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pendapatan Bunga -LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pendapatan Bunga Deposito – LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1,864,000,000.00	1,490,320,984.00	79.95	1,668,733,877.00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	652,400,000.00	18,409,062.00	2.82	6,000,000.00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1,211,600,000.00	1,471,911,922.00	121.48	1,662,733,877.00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA	1,100,000,000.00	218,810,572.00	19.89	2,212,591,920.00
	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan-LRA	1,100,000,000.00	218,810,572.00	19.89	2,212,591,920.00
8	Pendapatan Denda	350,000,000.00	243,804,370.00	69.66	261,826,353.00
	Pendapatan Denda Pajak	350,000,000.00	217,504,582.00	62.14	208,012,798.00
	Pendapatan Denda Retribusi	0.00	26,299,788.00	0.00	53,813,555.00
	- Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0.00	524,000.00	0.00	1,120,000.00

	- Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0.00	25,775,788.00	0.00	52,693,555.00
	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda-LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Pendapatan dari Pengembalian	500,000,000.00	632,280,372.00	126.46	251,592,741.00
	Pendapatan dari Pengembalian	500,000,000.00	632,280,372.00	126.46	251,592,741.00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	0.00	0.00	0.00	122,597,700.00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	250,000,000.00	204,823,766.00	81.93	35,613,389.00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	250,000,000.00	427,133,144.00	170.85	93,381,652.00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Listrik	0.00	323,462.00	0.00	0.00
10	Pendapatan BLUD	90,365,298,000.00	98,056,463,233.00	108.51	86,671,796,337.00
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	90,231,046,000.00	98,056,463,233.00	108.67	86,671,796,337.00
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	95,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Pendapatan Lain-lain BLUD	39,252,000.00	0.00	0.00	0.00
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	4,364,397,000.00	4,866,043,527.00	111.49	6,647,779,157.00
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	4,364,397,000.00	4,866,043,527.00	111.49	6,647,779,157.00
12	Pendapatan Bunga	0.00	56,565,319.00	0.00	0.00
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0.00	56,565,319.00	0.00	0.00
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0.00	987,500.00	0.00	0.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0.00	987,500.00	0.00	0.00
14	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	104,718,695,000.00	107,471,920,888.00	102.63	98,938,143,716.00

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran – sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 21(dua puluh satu) Sasaran Strategis dan 21 (dua puluh d) Indikator Kinerja Utama,

Hampir keseluruhan indicator dapat terukur, sehingga kinerja penetapan indicator untuk tahun 2023 telah dapat dibandingkan dengan tahun lalu.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan , maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi Pemerintah ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam rangka perbaikan system monitoring, evaluasi, pengendalian capaian kinerja dan pelaporan kinerja, maka upaya pengembangan terhadap e-Sakip perlu terus dilakukan terutama berkaitan dengan penambahan fitur dan aplikasi baru yang mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya,secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapaindikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 - 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023, belum mencapai target. Masih terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

Pangkajene Sidenreng, 14 Maret 2024



LAMPIRAN

**RENCANA KINERJA TAHUN 2023
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas SDM yang Inklusif dan berdaya saing	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,18
2	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.	2	Indeks Pendidikan.	Indeks	63,93
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	3	Indeks Kesehatan.	Indeks	77,34
4	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	4	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59,01
5	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	5	PDRB Perkapita AHB	Juta Rupiah	51,26
6	Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Perekonomian	6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,51-6,01
7	Menurunnya Angka Kemiskinan	7	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,17
8	Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan	8	Gini Ratio	Point	0,328
9	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,65
10	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Daerah	10	Nilai Investasi	Triliun Rp.	3.946,04
11	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	11	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	Persen	5,81-7,71
12	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.	12	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	77.22
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,48
14	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,11 (B)
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	15	Nilai SAKIP	Point	78,78(BB)
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	16	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,35(B)
17	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,60
18	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7854
19	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	19	Persentase Desa maju dan mandiri (IDM)	Persen	85,29
20	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20	Angka Kriminalitas	Kasus	339
21	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	21	Angka Kriminalitas Tertangani	Persen	76,11

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas SDM yang Inklusif dan berdaya saing	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,18	72.71	100,73
2	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.	2 Indeks Pendidikan.	Indeks	63,93	63.50	99,33
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	3 Indeks Kesehatan.	Indeks	77,34	78,06	100,93
4	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	4 Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59,01	56,71	96,38
5	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	5 PDRB Perkapita AHB	Juta Rupiah	51,26	55,51	100,29
6	Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Perekonomian	6 Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,51-6,01	3,28	62,36
7	Menurunnya Angka Kemiskinan	7 Tingkat Kemiskinan	Persen	3,17	5,14	37,85
8	Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan	8 Gini Ratio	Point	0,328	0,345	94,82
9	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	9 Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,65	3,29	141,77
10	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Daerah	10 Nilai Investasi	Triliun Rp.	3,946,04	4,18032	105,94
11	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	11 Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	Persen	5,81-7,71	1,077	15,93
12	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.	12 Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	77,22	75.23	97,42
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,48	65.79	97,50
14	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	14 Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,11 (BB)	48.74	63,21
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	15 Nilai SAKIP	Point	78,78 (BB)	64.25	81,56

16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	16	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88.32 (A)	77.41	87,62
17	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,60	2,87	110,38
18	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7854	0,7974	101,53
19	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	19	Persentase Desa maju dan mandiri	Persen	85,29	91.18	106,90
20	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20	Angka Kriminalitas	Kasus	339	730	15,34
21	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	21	Angka Kriminalitas Tertangani	Persen	76,11	87.40	114,83

**PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	1	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	53,97
		2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,76
2	Meningkatnya akses dan kesempatan kerja	3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,47
3	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	4	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,52
		5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,21
		6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,66
4	Berkurangnya Ketimpangan Pendapatan	7	Gini Ratio	Poin	0,354
5	Membaiknya Kehidupan Sosial kemasyarakatan	8	Tingkat Kriminalitas yang Tertangani	Persen	77,2
		9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64,05
6	Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	10	Indeks Resiko Bencana	Indeks	119,2
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	11	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,36 (CC)
		12	Nilai SAKIP	Poin	65,89 (B)
8	IKM	13	IKM	Persen	80,33 (B)
9	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	65,33



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**
BAGIAN ORGANISASI
SUB BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN KINERJA SETDA

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	06 September 2018
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	
Disahkan oleh	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SUDIRMAN BUNGI, S.IP, M.Si Nip.19700827 199009 1 002
Nama SOP	PENGUMPULAN DATA KINERJA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsip dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/KotaPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisas Perangkat DaerahPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">Menguasai alur persuratanMampu mengklasifikasikan surat menurut jenisnyaSarjana Hukum
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">SOP Pembuatan LAKIPSOP Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Tim	<ol style="list-style-type: none">Buku AgendaEkspedisiLembar Disposisi
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Bila penyusunan tidak dilaksanakan, maka data laporan kinerja tidak dapat disajikan dengan baik	

Pelaksana					Mutu Baku				
Uraian Prosedur		Tim LAKIP	kabag	I subbag	Staf Sub Bagian	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Memerintahkan Kasubag untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja Sekretariat Daerah					Peraturan yang ada	5 menit	Perintah	
1.	Mebuat surat permintaan data kinerja .					Bahan-bahan / materi sesuai Peraturan yang ada	30 menit	Tersedia kelengkapan yang akan digunakan dan dijadikan pedoman dalam pengumpulan bahan/materi	
2.	Mengirim surat permintaan data kinerja.					Bahan-bahan / materi sesuai Peraturan yang ada	15 menit	Bahan/materi telah selesai dan siap dibagikan Tim penyusunan lakip	
3.	Menerima dan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing bagian.					Daftar bahan/Materi Pulpen.	120 menit	Bahan/materi telah tersedia	
4.	Memeriksa, merekap data yang diterima untuk di olah menjadi laporan Kinerja					Bahan/materi	15 menit	Laporan kinerja Siap untuk disusun	

DAFTAR PENGHARGAAN SIDRAP 2023 (s.d. 13 Desember 2023)

NO	NAMA PENGHARGAAN	ASAL PENGHARGAAN	WAKTU PENYERAHAN	TEMPAT PENYERAHAN	HADIR MENERIMA	Link Berita
1	Penghargaan RS Nene Mallomo menyukseskan Operasi Katarak memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2022	Kementerian Sosial Republik Indonesia	Rabu (1/2/2023)	RSUD Nene Mallomo	Direktur RSUD Nene Mallomo, drg. Hj. Sahriah Usman	http://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Berita/detail_berita/rsud-nene-mallomo-terima-penghargaan-kementerian-sosial
2	Penghargaan Dinas Kominfo selaku walidata dalam menyukseskan pengumpulan data "Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2023"	Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidrap	Kamis (16/2/2023)	Ballroom Al-Goni Hotel Grand Sindy, Pangkajene	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Kominfo, Mashuri	http://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Berita/detail_berita/sukseskan-sidenreng-rappang-dalam-angka-dinas-kominfo-sidrap-terima-penghargaan-bps
3	Piala Adipura Kategori Kota Kecil tahun 2022	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI	Selasa (28/2/2023)	Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat	Bupati Sidrap, H. Dollah Mando	http://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Berita/detail_berita/kabupaten-sidrap-kembali-raih-piala-adipura
4	Trofi Universal Health Coverage (UHC) Award	Pemerintah Pusat	Selasa (14/3/2023)	Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan	Bupati Sidrap, H. Dollah Mando	http://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Berita/detail_berita/sidrap-terima-uhc-award-dari-pemerintah-pusat
5	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BPK RI	Jumat (12/5/2023)	Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar	Bupati Sidrap, H. Dollah Mando	http://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Berita/detail_berita/tujuh-kali-berturut-turut-sidrap-raih-wtp-dari-bpk
6	Piagam penghargaan peringkat I kategori kabupaten tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2022 terhadap Laporan	Kementerian Dalam Negeri	Jumat (14/7/2023)	Aula Kantor Gubernur Sulsel, Makassar	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum Sidrap, Fandy Anshary	http://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Berita/detail_berita/sidrap-peringkat-pertama-di-sulsel-evaluasi-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah-2022

	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2021					
7	Penghargaan nakes teladan tingkat nasional tahun 2023	Kementerian Kesehatan RI	Jumat 4 Agustus 2023	The Sultan Hotel and Residence Jakarta	Kepala Instalasi Gizi RSUD Arifin Nu'mang (Arnum), Risma Ernawati, S.ST.,MM.	http://sidrapkab.go.id/site/index.php?Berita/detail_berita/selamat-kepala-instalasi-gizi-rsud-arifin-numang-raih-nakes-teladan-nasional
8	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Pratama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Selasa (15/8/2023)	Hotel Maxone, Makassar	Bupati Sidrap, H. Dollah Mando	http://sidrapkab.go.id/site/index.php?Berita/detail_berita/sidrap-sabet-dua-penghargaan-di-peringatan-hari-anak-nasional-2023
9	Penghargaan kabupaten tercepat replikasi tahun 2021 dalam penyusunan peraturan bupati, replikasi desa, dan penyediaan anggaran dana desa.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Selasa (15/8/2023)	Hotel Maxone, Makassar	Bupati Sidrap, H. Dollah Mando	http://sidrapkab.go.id/site/index.php?Berita/detail_berita/sidrap-sabet-dua-penghargaan-di-peringatan-hari-anak-nasional-2023
10	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2023	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Senin (28/8/2023)	Wisma Negara, Center Point of Indonesia, Makassar	Bupati Sidrap, H. Dollah Mando	http://sidrapkab.go.id/site/index.php?Berita/detail_berita/sidrap-terima-penghargaan-pembangunan-daerah-di-pembukaan-pekan-raya-sulsel-2023
11	Penghargaan terbaik kedua kerja sama lintas sektor percepatan, pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Kamis (31/8/2023)	Hotel Remcy Makassar	Plt Kadis Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidrap, Herfan Mappajepu	http://sidrapkab.go.id/site/index.php?Berita/detail_berita/sidrap-raih-penghargaan-penanganan-stunting

12	Kabupaten/kota dengan capaian imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0-11 bulan berdasarkan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) tertinggi nasional	Kementerian Kesehatan RI				-
13	Kabupaten/kota dengan capaian imunisasi dasar lengkap tertinggi (ASIK) Januari s/d Oktober 2023	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan				-
14	Tertinggi capaian SPM TBC sesuai standar	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan				-
15	Swasti Saba Padapa Tingkat Nasional	Kementerian Kesehatan RI	Selasa (28/11/2023)	Ballroom Kempinski Hotel Jakarta		
16	Dukungan Percepatan Berbasis Masyarakat	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan				
17	Terbaik I dalam pelaksanaan elektronik pencatatan pelaporan misi berbasis masyarakat	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan				
18	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award	KemenPAN RB		via zoom		
19	Reformasi Birokrasi Award	KemenPAN RB		via zoom		
20	Juara II Unit Pemberantasan Pungutan Liar UPP TA 2023	Polda	(29/11/2023)	Sheraton Hotel Makassar	Wakapolres	
21	Penghargaan Kadis Pertanian Sidrap atas dedikasi dan peran serta secara aktif dalam program mandiri benih Sulsel tahun 2023	Gubernur Sulsel	(17/8/2023)		Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan	